

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing sehingga pada akhirnya menjadi pengangguran. Salah satu kota yang masih memiliki permasalahan mengenai kemiskinan yaitu Kota Pangkal Pinang (Dinsospembud, 2018).

Tingkat kemiskinan di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2017 yaitu sebesar 9,76 persen, sedangkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 10,12 persen. Hal ini, berarti dalam jangka waktu satu tahun telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,36 poin. Namun pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kota Pangkal pinang kembali meningkat menjadi 10,27 persen. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut, dipengaruhi dari program-program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat, sedangkan peningkatan kemiskinan yang terjadi merupakan salah satu permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut (Badan Pusat Statistik, 2018).

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sejak diterbitkannya peraturan presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,

dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sejak tahun 2017.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Guna mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan. Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan.

Berdasarkan data dalam Riky (2014), menjelaskan bahwa pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu : *Pertama*, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial

Rastra tersebut. Sementara, *Inclusion Error* sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut. *Kedua*, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. *Ketiga*, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Melihat dari permasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga 2017, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastra, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik, dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Salah satu kota di Pulau Sumatera yang menerapkan program BPNT adalah Kota Pangkal Pinang.

Berdasarkan data BPS (2018), jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.732.813 jiwa dengan rumah tangga miskin sebanyak 631.467 kepala keluarga (KK) yang tersebar pada 6 kabupaten dan 1 kota. Angka tersebut menunjukkan ada kemiskinan yang cukup tinggi sehingga jumlah BPNT yang dibutuhkan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang merupakan satu-satunya Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah BPNT terbesar ke empat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Jumlah BPNT Per Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK)	Jumlah BPNT (Kg)
Bangka	311.085	18.020	10.652
Belitung	175.048	14.000	8.238
Bangka Barat	196.598	6.350	4.270
Bangka Tengah	180.903	11.120	6.275
Bangka Selatan	193.583	7.580	4.223
Belitung Timur	119.394	8.930	4.121
Kota Pangkalpinang	196.202	10.270	5.679
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.372.813	76.270	43.458

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Pagu atau daftar jumlah alokasi BPNT tahun 2018 di Kota Pangkal Pinang berjumlah 5.682 kg dengan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) sebanyak 10.270 KK. Berdasarkan jumlah Pagu yang dikeluarkan oleh BPS tersebut menunjukkan jumlah keluarga miskin di Kota Pangkal Pinang cukup tinggi. Tim Program BPNT melaksanakan distribusi sampai ke kantor kelurahan dan bantuan pangan tersebut didistribusikan ke tangan RTM sebagai penerima, baik perseorangan maupun berkelompok dilaksanakan oleh Petugas Kelurahan. Padahal Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang paling dekat dengan pemerintahan daerah dan satu-satunya kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak menutup kemungkinan dari penyimpangan, diantaranya seperti ketidaktepatan sasaran penerima BPNT, keterlambatan pendistribusian dan rendahnya kualitas beras yang diterima, kriteria kemiskinan yang kurang jelas. Menurut BPS (2018), salah satu daerah yang memiliki jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terbesar di Kota Pangkal Pinang adalah Kecamatan Rangkui yaitu sebesar 1096 KPM ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan kecamatan lain. Pada Kecamatan Rangkui tepatnya di kelurahan Parit lalang dan Masjid Jamik yang merupakan kelurahan dengan jumlah KPM terbesar dan terkecil di Kecamatan Rangkui.

Oleh sebab itu, efektivitas pelaksanaan program BPNT perlu dievaluasi terkait dengan perbedaan sistem pendistribusian dengan program-program sebelumnya seperti raskin dan rastra. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kriteria penerima program BPNT di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program BPNT di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan penemuan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kriteria penerima program BPNT di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mengidentifikasi proses pelaksanaan program BPNT di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Menganalisis efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Sebagai sumber informasi bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan menyusun rencana pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan evaluasi masyarakat dalam keefektifan pelaksanaan BPNT dan manfaat yang mereka terima dari program tersebut.
3. Sebagai rujukan atau referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan program BPNT.

